



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Balubur Limbangan Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 76**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN BALUBUR
LIMBANGAN TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema **“ Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Insfrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat ”** untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Bl.Limbangan sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Bl.Limbangan telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena

merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan ¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 13. Kepmendagri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
 23. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 24. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
 25. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 26);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
28. Keputusan Camat Bl.Limbangan Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bl.Limbangan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Bl.Limbangan;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja SKPD .

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja SKPD .

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bl.Limbangan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Bl.Limbangan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bl.Limbangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Bl.Limbangan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bl.Limbangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bl.Limbangan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bl.Limbangan, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut; Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bl.Limbangan

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN BL.LIMBANGANTAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut

Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bl.Limbangan Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bl.Limbangan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bl.Limbangan selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 5 (lima) Program 32 (tiga puluh dua) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, tidak ada semuanya memenuhi target :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.920.000,- terealisasi Rp. 7.920.000,-
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.950.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,-
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.907.680,- terealisasi Rp. 7.907.680,-
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.751.670,- terealisasi Rp. . 4.751.670,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 39.079.240,-

- teralisasi Rp. 39.079.240,-
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.248.620,- teralisasi Rp 15.248.620,-
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bngunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.751.670,- teralisasi Rp 4.751.670,-
- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.913.750,- teralisasi Rp. 20.913.750,-
- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.950.000,- teralisasi Rp. 4.950.000,-
- j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.775.000,- teralisasi Rp. 12.775.000,-
- k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 32.580.000,- teralisasi Rp. 32.580.000,-
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 200.000.000,- teralisasi Rp. 200.000.000,-
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 14.656.400,- teralisasi Rp14.656.400,-

- n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Meubeulair prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.890.000,-
terrealisasi Rp. 50.890.000,-
- o. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK Tingkat
Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu
anggaran tahun 2020 Rp. 14.800.000,- Rp. 14.800.000,-
- p. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB
Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 %
dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 11.448.100,- Rp.
11.448.100,-
- q. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan
Ketrentaman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan
prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran
tahun 2020 Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-
- r. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring dan Pembinaan
Penyelenggaran Pemerintah Desa prosentase realisasi keuangan
100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 19.343.500,-
Rp. 19.343.500,-
- s. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring BPNT
prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran
tahun 2020 Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-
- t. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan
Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 100%
dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.400.000,- Rp.
15.400.000,-
- u. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK
Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu

- anggaran tahun 2020 Rp. 16.550.000,- Rp. 16.550.000,-
- v. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Keagamaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.225.000,- Rp. 20.225.000,-
 - w. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Aktifitas Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
 - x. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 30.700.000,- Rp. 30.700.000,-
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.920.000,- terealisasi Rp. 7.920.000,-
 - b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.950.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,-
 - c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 7.907.680,- terealisasi Rp. 7.907.680,-
 - d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja prosentase realisasi

- keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.751.670,- terealisasi Rp. . 4.751.670,-
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 39.079.240,- terealisasi Rp. 39.079.240,-
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.248.620,- terealisasi Rp 15.248.620,-
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bngunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.751.670,- terealisasi Rp 4.751.670,-
- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.913.750,- terealisasi Rp. 20.913.750,-
- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 4.950.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,-
- j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 12.775.000,- terealisasi Rp. 12.775.000,-
- k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan Ke Dalam Daerah prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 32.580.000,- terealisasi Rp. 32.580.000,-
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.

- 200.000.000,- terealisasi Rp. 200.000.000,-
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 14.656.400,- terealisasi Rp.14.656.400,-
 - n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Meubeulair prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.890.000,- terealisasi Rp. 50.890.000,-
 - o. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyusunan RPTK Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 14.800.000,- Rp. 14.800.000,-
 - p. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 11.448.100,- Rp. 11.448.100,-
 - q. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-
 - r. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Desa prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 19.343.500,- Rp. 19.343.500,-
 - s. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring BPNT prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,-
 - t. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya prosentase realisasi keuangan 100%

dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 15.400.000,- Rp. 15.400.000,-

- u. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 16.550.000,- Rp. 16.550.000,-
- v. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Kegiatan Keagamaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.225.000,- Rp. 20.225.000,-
- w. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Aktifitas Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
- x. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 30.700.000,- Rp. 30.700.000,-

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bl.Limbangan pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bl.Limbangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bl.Limbangan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2020

Renstra SKPD Kecamatan Bl.Limbangan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bl.Limbangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Bl.Limbangan yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan

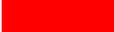
program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)	82.75	102.16		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)	100	100.00		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						Kondisi Akhir (F)	B	100.00		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan									

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Bl.Limbangan tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.

2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD ;
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Bl.Limbangan Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Bl.Limbangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bl.Limbangan s/d Tahun 2021

Provinsi Jawa Barat

Nama SKPD : Kecamatan Bl.Limbangan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PERANGKAT DAERAHTahun 2025 (akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH)	Realisasi target kinerja hasil pogram dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PERANGKAT DAERAHTahun 2020 (tahun lalu/n-2)			Target program/kegiatan Renja PERANGKAT DAERAHTahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PERANGKAT DAERAHs/d tahun 2020(tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rekening Lstrik	60	12	60	12	20	12	12	20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran STNK	5	1	5	1	20	1	1	20	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan Alat pembersih	60	12	60	12	20	12	12	20	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang Memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK sesuai kebutuhan	5	1	5	1	20	1	1	20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	5	1	5	1	20	1	1	20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Gedung kantor yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	25	5	25	5	20	5	5	20	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat di Kecamatan	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Luar Daerah										
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait beserta Desa	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
					Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebeulair yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah gedung/ Rumah dinas yang memadai	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
					Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Umum	Jumlah Peserta/Aparatur yang Mengikuti Diklat	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik									
					Program penunjang Kegiatan Kecamatan										
					Pengelolaan Sampah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah Kecamatan	10	2	10	2	20	2	2	20	

Program penyelenggaraan tugas Pemerintah Umum tingkat Kecamatan															
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Patroli	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Jumah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT									
					Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Jumlah Aparatur Kelurahan/ Desa yang Memiliki berkinerja baik	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Kegiatan TP. PKK Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah Upacara Hari Besar nasional dan Upacara/Acara lainnya yang dilaksanakan	10	2	10	2	20	2	2	20	
					Penyelenggaraan Aktivitas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Aktivitas kkegiatan Pemuda dan Olahraga	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Program Penyelenggaraan Paten	Program PATEN									
					Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	5	1	5	1	20	1	1	20	
					Layanan Pada Hari Libur (LAPHALI)	Jumlah Jenis Layanan Pada Hari Libur	5	1	5	1	20	1	1	20	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2020

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bl.Limbangan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standa r nasion al	IK K	Target Renstra PERANGKAT DAERAH					Realisasi Capaian		Proyek si Tahun 2021	Catata n Analisi s
				Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2020	Tahu n 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Indeks kepuasan masyarak at			82	82,5	82,5	823	83	82,7 5		82	
2	Prosentas e Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyeleng gara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bl.Limbangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bl.Limbangan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka

RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAHse Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bl.Limbangan

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan Kecamatan Bl.Limbangan sebesar Rp. 2.725.409.190-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bl.Limbangan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2021 Kecamatan Bl.Limbangan mengusulkan 6 (enam) Program dengan 30 (Tiga puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Bl.Limbangan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2020

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut Kecamatan Bl. Limbangan

Nama PERANGKAT DAERAH :

No	Rancangan awal Renja Tahun 2020					Hasil Anaisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Pogram/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Pogram/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah pembayaran Rekening Lstrik		7,920,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah pembayaran Rekening Lstrik		7,920,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK		3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK		3,000,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan	Jumlah petugas kebersihan dan Alat pembersih		7,907,680	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan	Jumlah petugas kebersihan dan Alat pembersih		7,907,680	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan	Jumlah Peralatan kerja yang Memadai		4,158,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan	Jumlah Peralatan kerja yang Memadai		4,158,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan	Jumlah ATK sesuai kebutuhan		39,079,240	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan	Jumlah ATK sesuai kebutuhan		39,079,240	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan		15,248,620	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan		15,248,620	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Penerangan Gedung kantor yang memadai		4,751,670	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Penerangan Gedung kantor yang memadai		4,751,670	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai		46,853,430	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai		46,853,430	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan	Jumlah Peralatan rumah tangga yang memadai		20,913,750	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan	Jumlah Peralatan rumah tangga yang memadai		20,913,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan		4,950,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan		4,950,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat di Kecamatan		12,775,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat di Kecamatan		12,775,000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Luar Daerah	Kecamatan Bl. Limbangan	Jumlah Rapat Korrdinasi dengan Daerah luar Kabupaten Garut		5000000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Luar Daerah	Kecamatan Bl. Limbangan	Jumlah Rapat Korrdinasi dengan Daerah luar Kabupaten Garut		5000000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kecamatan	Jumlah Rapat Korrdinasi dengan Instansi terkait beserta Desa		32,580,000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kecamatan	Jumlah Rapat Korrdinasi dengan Instansi terkait beserta Desa		32,580,000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%		

	Pengadaan Meubeulair	Kecamatan	Jumlah Mebeulair yang memadai		50,890,000	Pengadaan Meubeulair	Kecamatan	Jumlah Mebeulair yang memadai		50,890,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai		14,656,400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai		14,656,400	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kecamatan	jumlah gedung/ Rumah dinas yang memadai		200,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kecamatan	jumlah gedung/ Rumah dinas yang memadai		200,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100%		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100%		
	Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Umum	Kecamatan	Jumlah Peserta/Aparatur yang Mengikuti Diklat		15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Umum	Kecamatan	Jumlah Peserta/Aparatur yang Mengikuti Diklat		15,000,000	
5	Program Perencanaan dan Pelaporan keuangan			100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%		
	Pelaporan Keuangan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik		7,351,700	Pelaporan Keuangan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik		7,351,700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kecamatan Bl. Limbangan	Jumlah Dokumen Perencanaan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik		7,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik		7,000,000	
6	Program Penunjang Kegiatan kecamatan			100%		Program Penunjang kegiatan Kecamatan			100%		
	Pengelolaan Sampah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah Kecamatan		125,000,000	Pengelolaan Sampah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah Kecamatan		125,000,000	
	Program penyelenggaraan tugas Pemerintah Umum			100%		Program penyelenggaraan tugas Pemerintah Umum			100%		

	tingkat Kecamatan				tingkat Kecamatan				
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	10,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	10,000,000	
	Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT	10,000,000	Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT	10,000,000	
	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan/ Desa yang Memiliki berkinerja baik	19,343,500	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan/ Desa yang Memiliki berkinerja baik	19,343,500	
	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB	11,488,100	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB	11,488,100	
	Penyusunan RPTK Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK	14,300,000	Penyusunan RPTK Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK	14,300,000	
	Kegiatan TP. PKK Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	16,550,000	Kegiatan TP. PKK Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	16,550,000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	20,225,000	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	20,225,000	
	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	Kecamatan	Jumlah Upacara Hari Besar nasional dan Upacara/ Acara lainnya yang	15,400,000	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/ Acara Lainnya	Kecamatan	Jumlah Upacara Hari Besar nasional dan Upacara/ Acara lainnya yang	15,400,000	

			dilaksanakan					dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Aktivitas Kepemudaan dan Olahraga	Kecamatan	Jumlah Aktivitas kegiatan Pemudan dan Olahraga		50,000,000	Penyelenggaraan Aktivitas Kepemudaan dan Olahraga	Kecamatan	Jumlah Aktivitas kkegiatan Pemudan dan Olahraga		50,000,000	
	Program Penyelenggaraan PATEN										
	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan		30,700,000	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan		30,700,000	
	Layanan Pada Hari Libur (LAPHALI)	Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Pada Hari Libur		17,760,000	Layanan Pada Hari Libur (LAPHALI)	Kecamatan			17,760,000	
Jumlah					840,802,090	-	-	-		840,802,090	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Bl.Limbangan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Bl.Limbangan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Garut

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah pembayaran Rekening Listrik	12 bl	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Pembayaran STNK	6 Unit	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah petugas kebersihan dan Alat pembersih	2 Item	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Peralatan kerja yang Memadai	17 Unit	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah ATK sesuai kebutuhan	42 Item	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Cetak dan penggandaan sesuai	2 Jenis	

			kebutuhan		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Penerangan Gedung kantor yang memadai	5 Item	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	3 Jenis	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Peralatan rumahtangga yang memadai	2 Jenis	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	3 Item	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Kegiatan Rapat di Kecamatan	365 Org	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Luar Daerah	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	1 Kali	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Rapat Korrdinasi dengan Instasi terkait beserta Desa	12 bln	
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan Meubeulair	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Mebeulair yang memadai	2 Jenis	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	8 Unit	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Bl. Limbangan	jumlah gedung/ Rumah dinas yang memadai	1 Gedung	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				
1	Pendidikan dan Pelatihan jabatan Fungsional Umum	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Peserta/Aparatur yang Mengikuti Diklat	2 Org	
	Program Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan				

1	Pelaporan Keuangan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Dokumen Pelaporan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik	1 Dok	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Dokumen Perencanaan PERANGKAT DAERAH yang lebih baik	1 Dok	
	Program Penunjang Kegiatan Kecamatan				
1	Pengelolaan Sampah Kecamatan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah Kecamatan	1 Keg	
	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum				
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	1 Keg	
2	Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program BPNT	14 Desa	
3	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Aparatur Kelurahan/ Desa yang Memiliki berkinerja baik	14 Desa	
4	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Kolektor PBB	2 Keg	
5	Penyusunan RPTK Kecamatan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Dokumen RPTK	1 Keg	
6	Kegiatan TP. PKK Kecamatan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kelurahan/ Desa	1 Keg	
7	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Keg	
8	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Upacara Hari Besar nasional dan Upacara/Acara lainnya yang	2 Keg	

			dilaksanakan		
9	Penyelenggaraan Aktivitas Kepemudaan dan Olahraga	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Aktivitas kkegiatan Pemuda dan Olahraga	1 Keg	
	Program Penyelenggaraan PATEN				
1	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	4 Jenis	
2	Layanan Pada Hari Libur (LAPHALI)	Kec. Bl. Limbangan	Jumlah Jenis Layanan Pada Hari Libur	2 Jenis	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Bl.Limbangan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Bl.Limbangan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang

dilaksanakan di Kecamatan Bl.Limbangan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bl.Limbangan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Bl.Limbangan mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan
Bl.Limbangan
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Desa Berkinerja Baik Prosentase Desa Berkinerja Baik	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik Prosentase Desa Berkinerja Baik	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip	B

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Bl.Limbangan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Bl.Limbangan sebagai Perangkat Daerahpelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bl.Limbangan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Bl.Limbangan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejala politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh

Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bl.Limbangan diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Bl.Limbangan Program dan kegiatan yang dirancang pada Tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam

proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bl.Limbangan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Bl.Limbangan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Bl.Limbangan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bl.Limbangan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bl.Limbangan dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6.980.718.561,-.

Adapun Program Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Peningkatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Bl.Limbangan pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Balubur Limbangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Balubur Limbangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							18,206,000					19,426,600
7	01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100 %	1 Kegiatan		18,206,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	19,426,600
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							128,204,800					141,025,280
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							128,204,800					141,025,280
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100 %	2 Kegiatan		78,204,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	86,025,280
7	01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Cabang / Golongan yang diikuti	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100 %	1 Kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	55,000,000
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							200,000,000					220,000,000
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							200,000,000					220,000,000
7	01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur	100.00 %	1 Kegiatan		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100.00 %	220,000,000
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							83,220,890					85,000,000
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							83,220,890					85,000,000
7	01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelaksanaan Razia	Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Timur		1 Kegiatan		83,220,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
TOTAL									2,725,408,190					3,271,299,309

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Bl.Limbangan Tahun 2021 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Bl.Limbangan Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.783.448.194,-, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

Program	Penunjang	Urusan	Pemerintahan	Daerah
Kabupaten/Kota				

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 8.877.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan
 - Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 1.662.008.194,-
 - Keluaran : Jumlah Pembayaran Gajidan Tunjangan ASN
 - Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 8.085.000,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Masukan : APBD 2022 Rp. 15.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan

- Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Masukan : APBD 2022 Rp. 209.339.101-
 Keluaran : Jumlah Jumlah Item Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 Hasil : Meningkatnya Pelayanan Publik
 Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Masukan : APBD 2022 Rp. 140.387.604,-
 Keluaran : Jumlah Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
 Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Masukan : APBD 2022 Rp. 18.869.535,-
 Keluaran : Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon .Air.dan Listrik
 Hasil : Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Kecamatan
 Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Masukan : APBD 2022 Rp. 24.800.000,-
 Keluaran : Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan
 Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 Capaian : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 9. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Bl.Limbangan Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bl.Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Bl.Limbangan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bl.Limbangan Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Bl.Limbangan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya

- komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN